

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik yang sering diidentikan dengan pemerintah atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan

pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Yuliani, dkk, 2010).

Menurut Isthika, dkk (2014), laporan keuangan merupakan sebuah media bagi entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan ini, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan ? apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami ?

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi double entry (Mardiasmo:2008).

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada beberapa kota di Jawa Timur, sehingga penelitian ini diberi judul : “**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus pada BPKAD Kab. Sidoarjo dan BPPKAD Kab. Gresik)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan SAKD, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.